
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TANJUNG PRIOK

Saida Zakiyah*, Isna Rahmawati

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: saidazkyh24@gmail.com

Submit : 11 Oktober 2025, Revisi : 25 Oktober 2025 , Approve : 01 Desember 2025

Abstract

The problem of social inequality in Indonesia impacts the limited access of the poor to basic services such as education, health, and economy. To address this issue, the government implements the Program Keluarga Harapan (PKH) or Conditional Cash Transfer Program as a form of conditional social assistance aimed at improving welfare and breaking the chain of poverty. This study contributes by evaluating the effectiveness of PKH implementation in a dense urban area, namely Tanjung Priok Sub-district, North Jakarta—a context that is still rarely studied compared to rural areas. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants were selected purposively, while data validity was tested through source triangulation. The research results indicate that PKH in Tanjung Priok Sub-district has been effectively implemented according to effectiveness indicators, primarily seen from the increased participation of children in education, improved compliance with health services, and the efforts of some Beneficiary Families (KPM) in developing productive economic activities. However, challenges are still found in the aspects of data validation and delays in fund disbursement.

Keywords: *Community, Economic Empowerment, Effectiveness, KPM, PKH.*

Abstrak

Masalah ketimpangan sosial di Indonesia berdampak pada terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan. Studi ini memberikan kontribusi dengan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PKH di kawasan urban padat, yaitu Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara—konteks yang masih jarang diteliti dibandingkan daerah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Kelurahan Tanjung Priok telah berjalan efektif sesuai dengan indikator efektivitas, terutama terlihat dari peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan, meningkatnya kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan, serta adanya upaya sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek validasi data dan keterlambatan pencairan dana.

Copyright © 2025, Jurnal Kommunity Online, 6 (2) 2025

© 2025 The Author(s). This is an open access article under CC-BY-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)



Kata Kunci: Efektivitas, KPM, Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi.

Pengutipan: Zakiyah, S & Rahmawati, I. 2025. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara. *Jurnal Community Online*, 2025, 172-185, doi: 10.15408/jko.v6i2.46839

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Fenomena ini berpengaruh besar terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Di negara-negara maju, ketimpangan seringkali muncul akibat perbedaan pendapatan dan kesenjangan sosial, sementara di negara berkembang seperti Indonesia, faktor-faktor struktural seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan ketimpangan antarwilayah menjadi penyebab utama. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik dalam aspek pangan maupun nonpangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03% dari total populasi masih memerlukan intervensi pemberdayaan yang komprehensif. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi konkret dari tantangan sistemik dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, yang menuntut strategi inovatif dan berkelanjutan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

PKH dirancang agar penerima manfaat memenuhi kewajiban tertentu, seperti menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Dengan demikian, PKH tidak hanya bersifat bantuan tunai semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada tujuan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Namun, dalam konteks perkotaan, pelaksanaan PKH menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan di wilayah pedesaan. Kelurahan Tanjung Priok di Jakarta Utara, misalnya, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yaitu 7.894 jiwa/km², di

mana sekitar 35% warganya tergolong miskin. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja pelabuhan dengan pendapatan yang tidak menentu dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi tersebut memperbesar urgensi pelaksanaan program perlindungan sosial seperti PKH.

Selain itu, karakteristik masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi menimbulkan tantangan tersendiri, seperti ketidakakuratan data penerima, perpindahan domisili, serta kesulitan verifikasi lapangan. Situasi ini dapat menyebabkan inclusion error, (keluarga tidak layak tetapi menerima bantuan) maupun exclusion error (keluarga miskin layak tetapi tidak tercatat sebagai penerima). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PKH di wilayah urban sangat bergantung pada keakuratan data, kapasitas pendamping sosial, serta adaptasi kebijakan terhadap dinamika masyarakat perkotaan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa PKH cukup efektif di wilayah pedesaan dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan anak, namun implementasinya di wilayah urban sering kali menghadapi masalah administratif, rendahnya keterlibatan penerima manfaat, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Studi-studi tersebut juga menekankan pentingnya pendampingan sosial sebagai faktor kunci keberhasilan program. Meskipun demikian, kajian mengenai efektivitas PKH di wilayah urban padat seperti Tanjung Priok masih sangat terbatas, padahal karakteristik sosial-ekonomi dan mobilitas penduduknya berbeda dengan daerah pedesaan.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam literatur PKH di Indonesia. Pertama, sebagian besar studi efektivitas PKH terfokus pada wilayah pedesaan dengan karakteristik demografis dan ekonomi yang relatif homogen, sementara wilayah urban padat seperti Tanjung Priok memiliki dinamika sosial-ekonomi yang jauh lebih kompleks, termasuk tingginya mobilitas penduduk, heterogenitas mata pencaharian di sektor informal, dan kepadatan hunian yang ekstrem. Kedua, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana karakteristik perkotaan memengaruhi akurasi targeting dan mekanisme verifikasi PKH. Ketiga, literatur tentang peran pendampingan dalam konteks perkotaan padat masih terbatas, padahal peran ini krusial dalam memastikan kepatuhan KPM terhadap kewajiban program serta optimalisasi pemanfaatan bantuan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas PKH dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta perubahan nyata yang dihasilkan oleh program, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh dalam

implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang efektivitas PKH di konteks perkotaan padat dengan kompleksitas sosial-ekonomi tinggi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana program CCT dapat diadaptasi untuk wilayah urban. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk yang memiliki kompleksitas sosial ekonomi tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif dinamika sosial, persepsi, serta pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat PKH di lapangan. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan metode kuantitatif, karena fokus penelitian bukan hanya pada pengukuran angka dampak ekonomi, melainkan pada proses, faktor sosial, serta konteks implementasi program di tingkat masyarakat.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Kelurahan Tanjung Priok, karena wilayah ini memiliki lebih dari 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dengan kepadatan penduduk tinggi serta dominasi pekerjaan di sektor informal. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini representatif untuk mengkaji efektivitas PKH di kawasan urban padat. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari Oktober 2024 hingga Maret 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, serta analisis hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan PKH, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap paling memahami implementasi PKH di lapangan. Terdapat informan utama, terdiri dari satu Koordinator PKH tingkat kota, satu Pendamping PKH Kelurahan Tanjung Priok, satu Ketua Kelompok KPM, serta empat KPM dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi Kementerian Sosial, dokumen pemerintah daerah, arsip PKH, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif terhadap kegiatan pendampingan dan pertemuan kelompok, wawancara semi-terstruktur menggunakan panduan fleksibel agar informan dapat menjelaskan pengalaman mereka secara terbuka, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, laporan administrasi, dan dokumen program PKH. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis juga dilengkapi dengan analisis tematik, di mana data dikelompokkan berdasarkan tiga indikator efektivitas: ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan perubahan nyata dalam pemberdayaan ekonomi KPM. Proses coding dilakukan secara manual dengan memberi label pada data wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema berulang serta hubungan antar konsep yang muncul selama penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber seperti koordinator, pendamping, dan KPM, serta memverifikasinya dengan dokumen resmi agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap dampak ekonomi secara numerik, sehingga hasil yang diperoleh lebih bersifat deskriptif dan kontekstual. Selain itu, temuan penelitian ini hanya merepresentasikan situasi di wilayah urban tertentu, yakni Kelurahan Tanjung Priok, sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh wilayah penerima PKH di Indonesia. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang berharga dalam memahami dinamika pelaksanaan PKH di kawasan perkotaan padat dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan program perlindungan sosial di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam menangani masalah kemiskinan di Kelurahan Tanjung Priok. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri dan maju

dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Tanjung Priok.

Peneliti dalam menganalisis efektivitas program keluarga harapan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010), bahwa indikator efektivitas program terdiri dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis tematik hasil wawancara, observasi lapangan, serta perbandingan dengan studi-studi sebelumnya terkait implementasi PKH di konteks perkotaan.

a. Pemahaman Program

Menurut Sutrisno (2010), pemahaman program yang ditunjukkan adalah bagaimana sebuah program dirancang atau diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh penerima program. Pemahaman program pada Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada sejauh mana keluarga penerima manfaat (KPM) memahami secara menyeluruh tujuan, manfaat, hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengetahui bagaimana pemahaman KPM, diperlukan bukti sebagaimana yang dikatakan oleh Koordinator Kota PKH Jakarta Utara, Pak Fadhlhi.

“Dalam sosialisasi ini, informasi mendalam tentang tujuan program, syarat dan ketentuan, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing KPM diberikan. Upaya ini dilakukan agar penerima bantuan tidak hanya mengandalkan bantuan secara pasif, tetapi juga memahami bahwa program ini dirancang sebagai sarana untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga secara bertahap.”

Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa sosialisasi rutin ini menjadi bentuk capacity building agar penerima bantuan tidak hanya pasif, melainkan memiliki kesadaran untuk berubah. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman KPM masih beragam sebagian besar memahami bahwa PKH adalah bantuan bersyarat, tetapi sebagian lain masih memandangnya sebagai bantuan konsumtif semata.

b. Tepat Sasaran

Menurut Sutrisno (2010) ketepatan sasaran memberikan gambaran sejauh mana program tersebut mampu menjangkau peserta yang tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Priok, para KPM memperoleh akses terhadap bantuan sosial bersyarat yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas hidup, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha, tetapi juga bagi keluarga prasejahtera yang masih berupaya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. PKH memberikan kesempatan bagi KPM untuk mengakses bantuan secara rutin sekaligus memperoleh pendampingan oleh para informan program. Ketepatan sasaran salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang diberikan pemerintah melalui PKH akan optimal apabila diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai KPM. Koordinator

PKH Kota Jakarta Utara menegaskan bahwa proses validasi data secara berkala sangat penting untuk menjaga ketepatan sasaran.

“Bantuan PKH di sini tepat sasaran karena kami sekarang menggunakan DTSEN, yang merupakan pengembangan dari DTKS. Datanya memang dari pusat, tapi pendamping tetap harus mengecek ke lapangan. Kami tidak ingin hanya mengandalkan data di komputer karena terkadang tidak sesuai dengan kondisi terkini.”

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Priok menunjukkan capaian yang cukup baik dalam hal ketepatan sasaran programnya. Bantuan yang diberikan pemerintah sebagian besar telah tersalurkan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam DTKS. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa keluarga penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok prasejahtera yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan mekanisme validasi dan verifikasi berkala, PKH berupaya menjaga agar penerima manfaat tetap sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi terkini.

Hal ini terlihat dari adanya pembaruan data yang dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH bersama pihak kelurahan untuk memastikan tidak ada keluarga yang berhak tetapi terlewat dari daftar penerima. KPM yang telah mendapatkan bantuan juga mengaku bahwa dana yang diterima sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya biaya pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil maupun balita. Meskipun demikian, mekanisme verifikasi lapangan ini tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Masih ditemukan beberapa kasus exclusion error, yakni keluarga miskin yang belum terdaftar akibat keterlambatan pembaruan data atau mobilitas tinggi penduduk perkotaan. Dengan demikian, secara umum ketepatan sasaran PKH di Kelurahan Tanjung Priok dapat dikategorikan efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan administratif yang menjadi tantangan khas di wilayah padat penduduk.

c. Tepat Waktu

Menurut Sutrisno (2010), ketepatan waktu didefinisikan sebagai pelaksanaan program sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Ketepatan waktu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan waktu pencairan bantuan berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar KPM, seperti biaya pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita, maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jika terjadi keterlambatan pencairan, maka KPM berpotensi mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan keluarga.

Secara umum, pencairan bantuan PKH di Kelurahan Tanjung Priok sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah, yaitu per triwulan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterlambatan transfer dana atau gangguan sistem perbankan yang menyebabkan penerima manfaat harus menunggu lebih lama. Pendamping PKH berperan penting dalam memberikan informasi kepada KPM agar tetap tenang ketika pencairan mengalami penundaan, sekaligus memastikan bahwa bantuan tetap diterima secara penuh. Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Kota PKH Jakarta Utara.

“Kami berusaha menyalurkan bantuan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Bantuan diberikan empat kali dalam setahun atau tiga bulan sekali. Terkadang ada keterlambatan yang disebabkan oleh sistem bank atau server pusat. Kami juga punya tim helpdesk dan grup pendamping di WhatsApp untuk menjawab keluhan KPM.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala teknis, secara keseluruhan ketepatan waktu PKH masih dapat dikategorikan efektif. Hal ini selaras dengan tujuan program, yaitu memberikan bantuan secara rutin agar dapat digunakan sesuai kebutuhan mendesak KPM. Ketepatan waktu juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PKH, karena keterlambatan berulang dapat menurunkan partisipasi dan motivasi penerima dalam mematuhi kewajiban program.

d. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2010), tercapainya tujuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Priok menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui bantuan tunai bersyarat, program ini berhasil meningkatkan akses keluarga prasejahtera terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. KPM merasakan langsung manfaat program. Ketua Kelompok PKH

RW 006 Kelurahan Tanjung Priok, Ibu Elly, menegaskan bahwa perubahan ini cukup signifikan:

“Saya melihat perubahan perilaku yang sangat positif. Misalnya, tingkat kehadiran anak sekolah meningkat, lebih banyak ibu yang sering membawa balitanya ke Posyandu, dan lebih banyak ibu yang memeriksa kehamilannya. Ini karena untuk tetap menerima bantuan, ada tugas yang harus dipenuhi. Saya melihat kemajuan bertahap menuju kemandirian, terutama pada keluarga yang telah lama menjadi penerima PKH. Beberapa ibu mulai membuka usaha kecil-kecilan.”

Program PKH terbukti mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Kewajiban seperti mengirim anak-anak ke sekolah dan mengakses layanan kesehatan telah membentuk perilaku positif. Kini, semakin banyak ibu penerima manfaat yang memulai usaha, menunjukkan nilai kemandirian yang semakin meningkat dalam keluarga penerima manfaat PKH. Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa KPM PKH percaya bahwa PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun PKH mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan, setidaknya PKH dapat meningkatkan taraf hidup KPM, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.

e. Perubahan Nyata

Menurut Sutrisno (2010), suatu program dikatakan efektif jika mampu menghasilkan perubahan yang dapat dilihat secara langsung dari sasaran program. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Priok menunjukkan adanya perubahan nyata pada kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tunai bersyarat yang diterima tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membawa dampak positif dalam perilaku sosial dan pola pikir keluarga miskin. Hal ini tampak dari meningkatnya kesadaran KPM untuk menyekolahkan anak-anak mereka, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta mulai berupaya mengelola bantuan agar lebih produktif.

Dalam aspek pendidikan, PKH berhasil mendorong anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap bersekolah. Banyak KPM mengaku bahwa sebelumnya mereka kesulitan memenuhi biaya seragam, buku, maupun transportasi. Namun, setelah menerima bantuan PKH, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sehingga anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. Dari sisi kesehatan, perilaku KPM juga mengalami pergeseran. Ibu hamil dan balita lebih aktif memeriksakan diri ke posyandu dan puskesmas, karena adanya kewajiban yang melekat pada program. Hal ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa kesehatan keluarga merupakan investasi penting untuk masa depan.

Selain pendidikan dan kesehatan, perubahan nyata juga terlihat dalam aspek ekonomi keluarga. Beberapa KPM memanfaatkan sebagian bantuan untuk mendukung usaha kecil, seperti membuka warung atau berdagang kebutuhan pokok. Walaupun belum sepenuhnya mandiri, langkah ini menjadi awal perubahan pola pikir bahwa bantuan PKH dapat menjadi penunjang kegiatan ekonomi, bukan semata-mata digunakan untuk konsumsi.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Koordinator Kota PKH yang menyatakan:

“Sebelum tergabung dengan program ini, sebagian besar KPM memiliki penghasilan dari pekerjaan mereka dan itupun tidak menentu. Pas sudah dapat bantuan ini, KPM mulai terbantu secara ekonomi, apalagi untuk kebutuhan anak-anak dan sehari-hari mereka. Setelah graduasi, banyak KPM yang sudah mampu secara ekonomi, bahkan ada pendapatannya meningkat dari hasil jualan ataupun dari anak mereka yang sudah lulus sekolah.”

Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan Ubaidillah selaku pendamping PKH di Tanjung Priok.

“Awalnya mereka cuma tunggu bantuan. Sekarang mereka mulai mikir cara pakai uang lebih bijak. Ada yang beli gerobak, ada yang nabung buat usaha kecil. Meski kecil, tapi ada niat berubah. Itu yang penting.”

Perubahan nyata di Tanjung Priok tidak hanya bersifat material (terpenuhinya kebutuhan dasar) tetapi juga perubahan pola pikir dan perilaku (*agency*). KPM mulai melihat bantuan PKH sebagai modal atau penunjang keberlangsungan usaha kecil, bukan sekadar dana konsumsi habis pakai. Perubahan ini sangat signifikan dalam konteks Jakarta Utara, di mana peluang kerja non-formal cukup tinggi. Perubahan nyata yang didorong oleh pendampingan intensif ini memosisikan PKH lebih dari sekadar jaring pengaman sosial, tetapi sebagai instrumen transformasi perilaku menuju kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKH di Tanjung Priok telah berhasil menimbulkan perubahan nyata bagi KPM, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Meskipun perubahan yang terjadi masih bertahap, hal ini menjadi bukti bahwa bantuan PKH tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga mampu mendorong transformasi perilaku menuju kemandirian ekonomi keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan

kualitas hidup, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH juga berfungsi sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hanya terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga didorong untuk lebih berdaya dan mandiri. Dalam implementasinya di Kelurahan Tanjung Priok, PKH didukung oleh dukungan stakeholder yang melibatkan pemerintah kelurahan, dinas sosial, dan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan dan pengawasan program. Peran pendamping PKH sangat vital sebagai garda terdepan dalam memberikan sosialisasi, mendampingi pencairan bantuan, dan memantau penggunaan dana. Partisipasi aktif KPM juga memperkuat program, dimana sebagian besar penerima memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan ibu hamil dan balita, serta sebagian kecil mengalokasikan dana untuk usaha kecil.

Namun implementasi PKH menghadapi beberapa hambatan, yaitu ketidakakuratan data dalam DTKS yang menyebabkan penerima tidak tepat sasaran dan keluarga miskin lainnya belum terdaftar. Keterlambatan pencairan dana akibat kendala teknis perbankan dan administrasi pusat menyulitkan KPM memenuhi kebutuhan mendesak. Keterbatasan jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan banyaknya KPM menyebabkan bimbingan tidak maksimal. Pemahaman KPM yang terbatas mengenai tujuan PKH juga menghambat, dimana masih ada penerima yang menganggap bantuan hanya sebagai tambahan konsumsi, bukan instrumen peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara umum telah berjalan efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Efektivitas tersebut tercermin dari ketepatan sasaran penerima bantuan yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diverifikasi melalui mekanisme validasi lokal oleh pendamping, ketepatan waktu pencairan bantuan yang sebagian besar sesuai jadwal, serta adanya perubahan nyata dalam peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Beberapa KPM bahkan telah memanfaatkan bantuan sebagai modal usaha produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan jumlah pendamping, keterlambatan pembaruan data akibat mobilitas

penduduk yang tinggi, serta hambatan teknis dalam pencairan dana pada periode tertentu. Selain itu, sebagian KPM masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap tujuan program, sehingga bantuan sering kali dimaknai hanya sebagai penopang konsumsi, bukan sarana pemberdayaan menuju kemandirian ekonomi.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas pemahaman tentang efektivitas PKH dalam konteks urban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam wilayah dengan karakteristik sosial yang dinamis seperti Tanjung Priok, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap indikator formal efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno (2010), tetapi juga oleh kemampuan program beradaptasi terhadap dinamika sosial perkotaan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran validasi lokal dan pendampingan sosial sebagai faktor kunci dalam menjaga ketepatan sasaran dan keberlanjutan program di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi.

Secara praktis, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas pendamping PKH agar lebih adaptif terhadap tantangan sosial ekonomi masyarakat perkotaan, serta peningkatan literasi ekonomi dan kewirausahaan bagi KPM agar bantuan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pembaruan data sosial secara lebih cepat, akurat, dan berbasis komunitas lokal menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan data akibat perubahan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi keluarga prasejahtera menuju kemandirian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jurnal Universitas Udayana. ISSN, 2302, 8556.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara. (2020). *Luas Wilayah Penduduk Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2019-2020*.
- Budiani Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, [S.l.], nov. 2012. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>>. Date accessed: 15 dec.

2025.

- Creswell. John W. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fiszbein, A., & Schady, N. (2021). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank.
- Habibullah, H. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang. *Sosio Informa*, 16(2) 2011. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.956>
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Fatmi Utami, E., Rahmatul Istiqomah, R., Asri Fardani, R., Juliana Sukmana, D., & Hikmatul Auliya, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, Maret, 63.
- Hendryadi, & Et, A. (2019). *Metode Penelitian Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: CV LPMP Impremium. Jakarta: LPMP Imperium., September.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI, 5(2), 7.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong J Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mouwn Erland. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, March, 72.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1. (n.d.). *Tentang Program Keluarga Harapan*. 2018. Rahim, A. R. (2020). *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamed Group., 4(2), 40–52. <https://doi.org/10.53958/wb.v4i2.39>
- Tesoriero, J. I. dan F. (2016). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. TNP2K. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2022*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Turner, D. P. (2020). *Sampling Methods in Research Design*. *Headache*, 60(1), 8–12. <https://doi.org/10.1111/head.13707>

- World B. (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Magelang. Skripsi Dipublikasikan. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.